



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

**ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS
DI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 1999-2003**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Terima Tgl :	13 JUN 2006	Klasifikasi	338.9 DIA a
No. Induk :			
Oleh :	KELAKIR / PENYALIN :		

RYAN TIRTA DIANSYAH
NIM. 010810101150

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2006**



**ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS
DI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 1999-2003**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh :

RYAN TIRTA DIANSYAH

NIM : 010810101150

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

JUDUL SKRIPSI

Analisis Penentuan Sektor Prioritas di Kabupaten Jombang tahun 1999-2003

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ryan Tirta Diansyah

N.I.M. : 010810101150

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

27 Mei 2006

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra Aminah. MM
NIP. 130 676 291

Sekretaris : Teguh Hadi P. SE, MSi
NIP. 132 056 182

Anggota : Drs. Urip Muharso
NIP. 131 120 333

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui/menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ryan Tirta Diansyah
NIM : 010810101150
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Penentuan Sektor Prioritas di Kabupaten
Jombang tahun 1999-2003

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 02 Juni 2006

Yang Menyatakan,

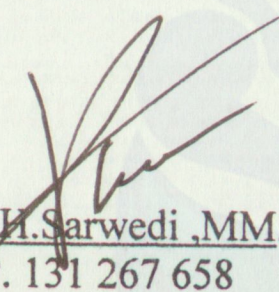


Ryan Tirta Diansyah

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penentuan Sektor Prioritas di Kabupaten
Jombang Tahun 1999 - 2003.
Nama Mahasiswa : RYAN TIRTA DIANSYAH
NIM : 010810101150
Jurusan : Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Pengembangan Regional

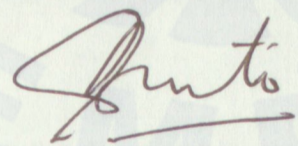
Pembimbing I,


Dr. H. Sarwedi, MM.
NIP. 131 267 658

Pembimbing II,


Drs. Urip Muharso.
NIP. 131 120 333

Ketua Jurusan,

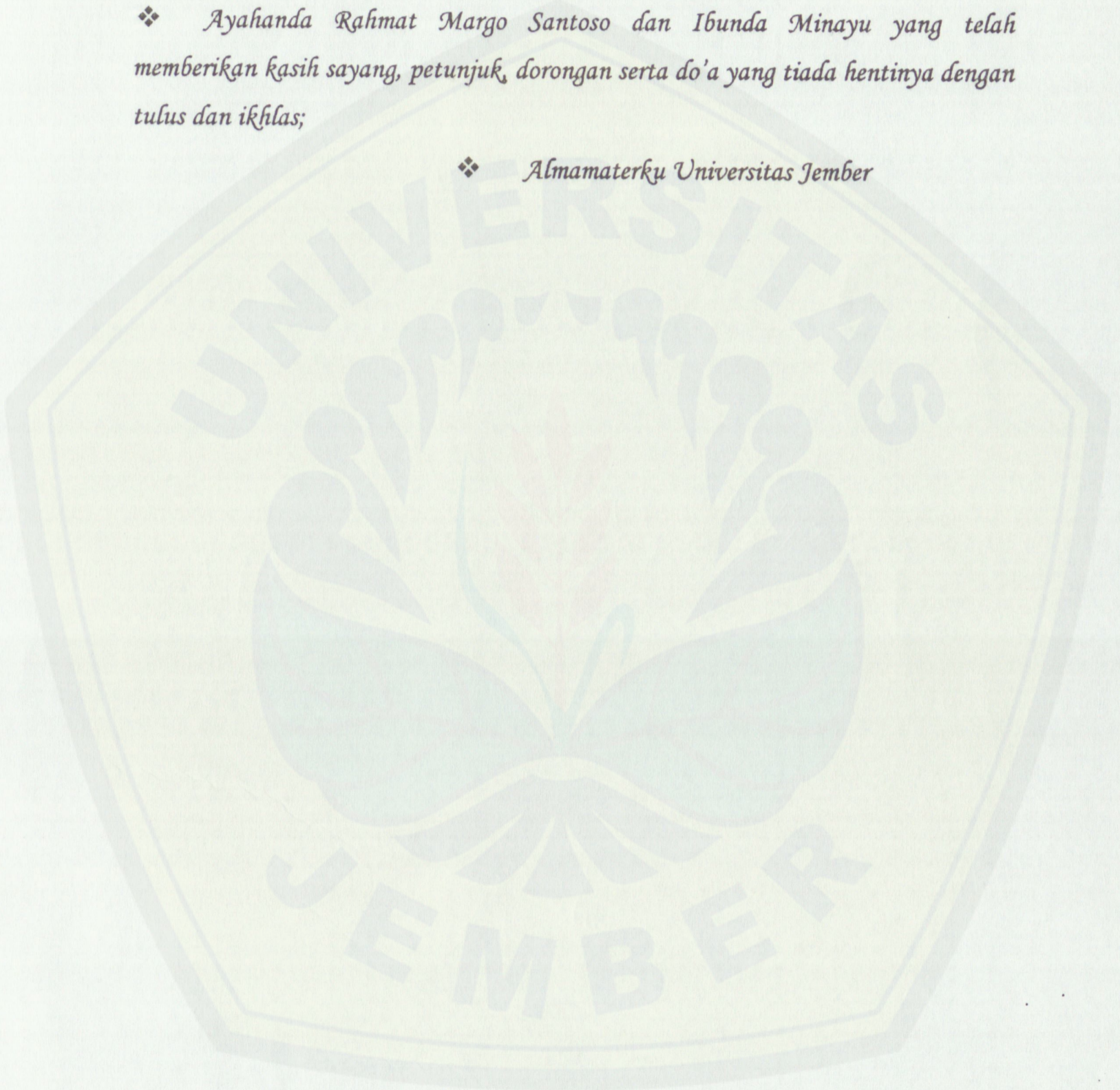

Drs. J. Sugiarto, SU.
NIP. 130 610 494

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkah dan rahmat Alloh SWT skripsi ini kupersembahkan untuk:

❖ *Ayahanda Rahmat Margo Santoso dan Ibunda Minayu yang telah memberikan kasih sayang, petunjuk, dorongan serta do'a yang tiada hentinya dengan tulus dan ikhlas;*

❖ *Almamaterku Universitas Jember*



MOTTO

".....Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(Q.s. Al-Insyirah : 6-7)

" Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, kehidupanku, dan matiku semuanya untuk Alloh SWT "

(Q.s. Al-An'aam : 162)

" Niscaya Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan dengan beberapa derajat "

(Q. S. Al Mujaadilah : 11)

ABSTRAKSI

Tujuan dari penulisan skripsi yang mengambil judul “ Analisis Penentuan Sektor Prioritas di Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003 “ adalah untuk menentukan sektor-sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Jombang antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Location Quotient* (LQ) dan *Coefisient Resufle* (CR). Dari ketiga analisis ini diketahui sektor prioritas di wilayah Kabupaten Jombang. Masing-masing analisis menunjukkan sektor yang berbeda-beda. Dengan perbedaan hasil analisis ini sebagai langkah terakhir untuk menentukan sektor prioritas pembangunan digunakan analisis skalling. Hasil analisis skalling akan dirangking dan sektor prioritas pembangunan sudah dapat ditentukan.

Berdasarkan hasil analisis akhir yaitu analisis skalling LQ, DLQ dan CR diketahui bahwa sektor prioritas di Kabupaten Jombang pada tahun 1999-2003 adalah sektor pertanian sebesar 5,1992 selanjutnya diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,2513 dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 2,6871.

Kesimpulan yang diambil, sektor yang menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 adalah 1) sektor pertanian; 2) sektor pengangkutan dan komunikasi; 3) sektor listrik, gas dan air bersih.

Kata Kunci : *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Location Quotient* (LQ), *Coefisient Resufle* (CR), Skalling

KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak langsung membantu penulis, baik secara materiil maupun moril serta bimbingan serta saran keilmuan yang tidak terhingga nilainya.

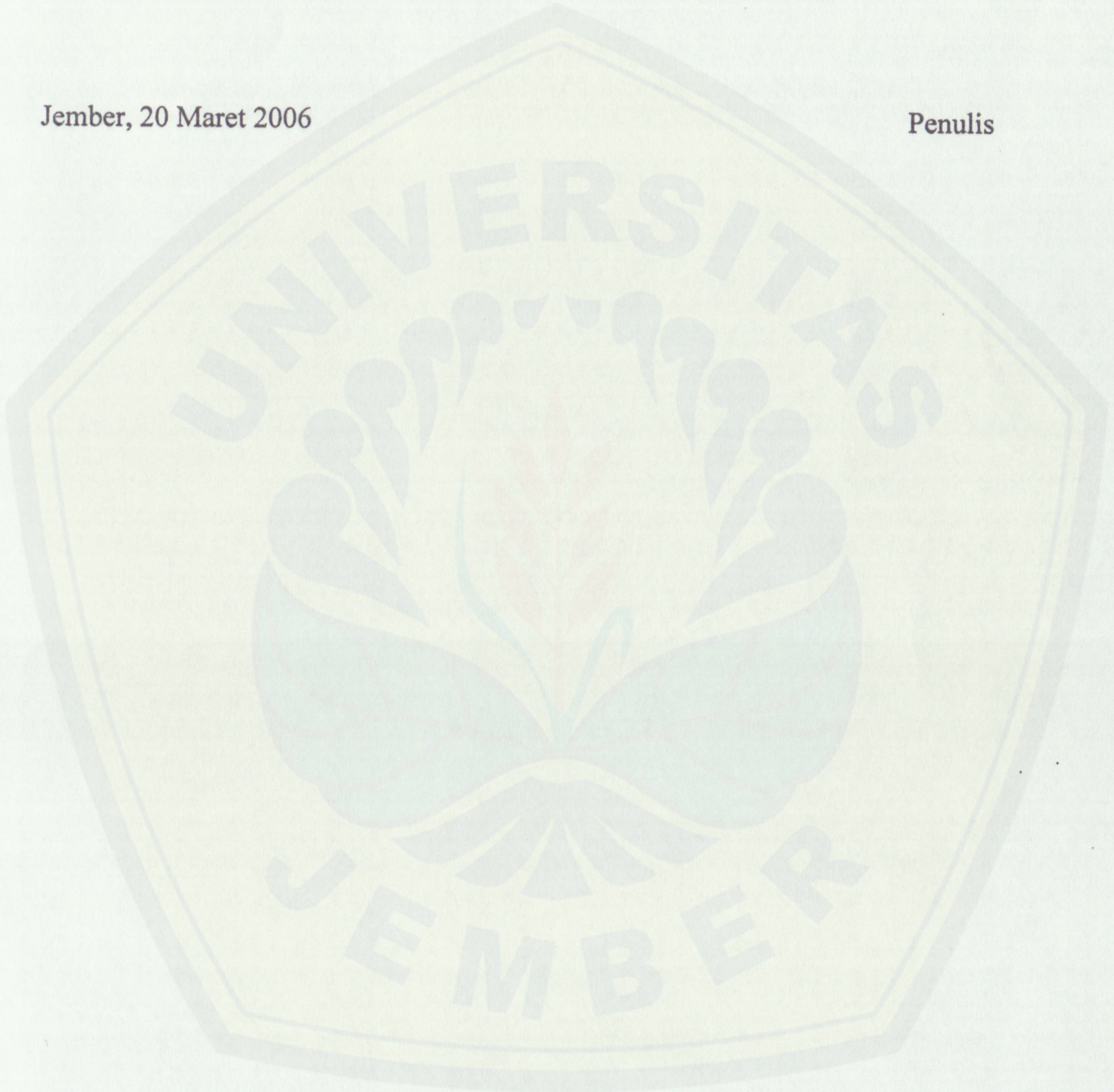
Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. H. Sarwedi ,MM selaku Dosen Pembimbing I dan Drs Urip Muharso selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta seluruh staf edukatif dan staf administratif
3. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta atas segala do'a, kasih sayang serta dorongan dan dukungannya yang tidak ternilai besarnya serta Adiku yang kusayangi.
4. Seluruh Staf BPS Jawa Timur dan BPS Kabupaten Jombang atas bantuan data dan informasi.
5. Teman-temanku kampus Richie, Dadang Kukuh, Burhan, Bos Eddy, Yoyok terima kasih atas nasehatnya dan bantuannya dan semuanya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu terima kasih atas dorongan, semangat dan rasa kekeluargaan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT, Amin.

Jember, 20 Maret 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DARTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	6
2.2 Landasan Teori	9
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	13
3.2 Metode Analisis Data	14
3.3 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran	17
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang.....	18
4.2 Analisis Data	23
4.3 Pembahasan	30
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	33

DAFTAR PUSTAKA.....34

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang per Tahun.....	19
2.	Kontribusi 9 Sektor Utama dalam PDRB Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (dalam persen).....	20
3.	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003.....	21
4.	<i>Location Quotient</i> Sektor Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003.....	24
5.	<i>Dynamic Location Quotient</i> Sektor Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003.....	26
6.	<i>Coefisient Resufle</i> Sektor Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003.....	27
7.	Skalling Sektor Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
1.	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah).
2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah).
3.	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003.
4.	Perhitungan <i>Location Quotient</i> Sektor Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003
5.	Perhitungan <i>Dynamic Location Quotient</i> Sektor Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003
6.	Perhitungan <i>Coefisient Resufle</i> Sektor Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

LPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional merupakan proses perubahan kearah kemajuan, hal tersebut mencakup pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Konstitusi forum, 2004:46).

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi juga mempunyai tiga sifat penting yaitu: (i) suatu proses yang terjadi terus menerus (ii) usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita (iii) kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus-menerus dalam jangka panjang (Soekirno, 1978:13). Pembangunan ekonomi pada umumnya masih banyak diwarnai oleh pendekatan sektoral di mana perencanaan secara makro masih mengikuti pencapaian target peningkatan produksi untuk masing-masing sektor bersangkutan, pendapatan per kapita setiap tahun dapat meningkat itu juga diharapkan perubahan peran antar sektor pun dapat berlangsung.

Target transisi sektoral yang dicantumkan dalam setiap Repelita hanya menitik beratkan pada peranan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target-target sektoral yang terperinci yaitu pengelompokan primer, sekunder, dan tersier ataupun kegiatan yang hanya menyangkut pertumbuhan, bukan peranan nilai tambahnya terhadap PDB (Prayitno, 1996:225). Peningkatan sumbangan sektor ekonomi terhadap PDB tidak lepas dari peranan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah. Daerah memiliki potensi dan karakteristik tertentu dan setiap daerah berbeda-beda. Perlu dikembangkan sehingga memberikan peranan yang semakin nyata dalam meningkatkan PDB nasional.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional di mana setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan masing-masing sektor dalam merebut pasar. Semakin besar kontribusi yang diberikan suatu sektor terhadap pendapatan nasional, berarti sektor tersebut mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sektor lainnya terutama dalam upaya memperoleh devisa (Spillane dan Usman, 1988:13).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan proses kenaikan out put perkapita dalam jangka panjang dimana pertumbuhan tersebut terjadi tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan masing-masing sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda pula. Adanya keterbatasan dana pembangunan menyebabkan pengembangan sektor-sektor tidak dapat dilakukan secara serentak, dibutuhkan adanya kebijakan yang tepat dan terarah. Dengan demikian dana pembangunan yang terbatas dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang tepat. Kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dengan menentukan sektor unggulan yang nantinya akan menjadi sektor pemimpin (*leading sector*) bagi sektor lainnya (Glasson, 1977:46).

Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi daerah mempunyai implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Peniruan pola mentah-mentah kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Jika akan membangun suatu daerah, kebijaksanaan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arysad, 1992:122).

Salah satu tujuan dari pembangunan regional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara implisit pertumbuhan ekonomi nasional

adalah mencakup pertumbuhan ekonomi regional karena ekonomi nasional tidak akan dapat tumbuh tanpa adanya pertumbuhan daerah. Dengan kondisi ini, tidak mengherankan jika pertumbuhan menjadi salah satu tujuan dari pembangunan regional. Tujuan pembangunan regional harus konsisten dengan tujuan pembangunan nasional yang umumnya terdiri atas: (1) mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita yang cepat; (2) menyediakan kesempatan kerja yang luas; (3) pemerataan pendapatan; (4) mengurangi perbedaan dalam tingkat pendapatan serta kemakmuran daerah; (5) mengubah struktur perekonomian agar tidak berat sebelah (Kadariah, 1982:71).

Pentingnya perencanaan regional bukan hanya untuk pembangunan akan tetapi antara lain dikemukakan oleh G. Myrdall perkembangan tidak merata dapat menimbulkan apa yang disebut dengan *backwash effect*, yaitu menaikkan tenaga kerja dan modal yang diperlukan kepada tempat yang mulai dibangun sehingga daerah lain disekitarnya menjadi mundur terbelakang. Setiap daerah mempunyai sistem pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, produksi yang merupakan kegiatan mengembangkan produksi daerah tersebut dan pertumbuhan hanya akan terjadi pada daerah yang mempunyai keuntungan komparatif, baik dari segi sumber daya alam, modal dan manusia. Adanya perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, mengakibatkan tingkat pertumbuhan juga akan berbeda. Pembangunan yang demikian dititik beratkan pada pembangunan sektoral (Simanjuntak, 1996:243). hal ini membuktikan bahwa pembangunan bidang ekonomi pada dasarnya masih banyak diwarnai oleh pendekatan sektoral, di mana perencanaan secara makro masih mengikuti sistem pencapaian target peningkatan produksi untuk masing-masing sektor yang bersangkutan. Dengan tercapainya target sektoral diharapkan di samping pendapatan per kapita setiap tahun dapat meningkat, juga akan meningkatkan perubahan atau transisi sektoral dari sektor pertanian ke sektor lainnya (Prayitno, 1996:221).

Disahkannya UU No 2 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No 25 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah melalui kebijakan desentralisasi, diharapkan dapat mengaktifkan kebijakan pemerintah

daerah dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan daerah sehingga kedepannya akan mampu memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru yang dapat memacu perekonomian nasional.

Menghadapi otonomi daerah Kabupaten Jombang dihadapkan pada suatu tantangan untuk mempersiapkan rencana dan strategi pembangunan yang akan diambil untuk itu perlu adanya perencanaan pembangunan yang tepat dengan memperhatikan banyak hal.

Kabupaten Jombang yang merupakan kota kecil dalam Propinsi Jawa Timur yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, menjadikan ciri khas Kabupaten Jombang sebagai kota / daerah agraris. Hal ini tercermin pada kontribusi persentase PDRB Kabupaten Jombang menurut lapangan usaha tahun 1999-2003 Atas Harga Konstan Tahun 1993. Pada tahun 1999 sektor pertanian menyumbang kontribusi sebesar 42,30%, tahun 2000 sebesar 42,24%, tahun 2001 sebesar 41,84%, tahun 2002 39,36%, tahun 2003 sebesar 36,63%.

1.2 Perumusan Masalah

Program pembangunan sektoral bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang. Adanya keterbatasan dana pembangunan mengharuskan adanya suatu kebijakan yang tepat dan terarah bagi pembangunan sehingga perlu dilakukan penetapan sektoral. Prioritas pembangunan ditinjau dari segi ekonomi ditentukan berdasarkan kegiatan sektor atau sub sektor berpotensi. Untuk itu perlu dikaji sektor mana yang secara potensial data ditetapkan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1999-2003.

Dari uraian singkat, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah: sektor apakah yang menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang 1999-2003

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- Tujuan penelitian ini adalah menentukan sektor-sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Jombang antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai :

1. sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu regional;
2. bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat bagi pengembangan daerah dan pengembangan sektor-sektor ekonomi di daerah Kabupaten Jombang;
3. bahan masukan lebih lanjut bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilaksanakan oleh Wibisono (2002) dengan judul “ Analisis Penentuan Sektor Basis Kabupaten Nganjuk Tahun 1996-2000 “ menjelaskan bahwa dengan analisis Reskalling LQ (*Location Quotient*) dan DLQ (*Dynamic Location Quotient*), sektor basis atau sektor prioritas di Kabupaten Nganjuk pada tahun 1996-2000 adalah sektor pertanian menempati urutan pertama, dan selanjutnya pada urutan kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan yang menempati urutan ketiga adalah adalah sektor jasa-jasa. Untuk mengetahui sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang, dianalisis dengan menggunakan analisis CR (*Coefisient Resufle*). Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai potensi menjadi sektor basis di masa yang akan datang adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Basis Ekonomi

Menurut Isard model kegiatan ekonomi basis adalah model analisis yang membagi sektor ekonomi menurut lokasi penjualan atau pemasaran. Sektor basis ekonomi didefinisikan sebagai sektor yang mampu memenuhi kebutuhan wilayah tersebut juga mengekspor keluar wilayah. Dengan demikian sektor basis ekonomi tersebut sangat memainkan peranan yang akan membawa pengaruh terhadap peningkatan sektor ekonomi bukan basis atau sektor ekonomi lainnya. Disisi lain ekonomi bukan basis merupakan kegiatan perekonomian yang bersifat lokal. Perkembangan ekonomi basis juga meliputi lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli yang selanjutnya memberikan keterkaitan positif terhadap kegiatan ekonomi lainnya (Hasbullah, 1994:367).



Sebab dengan adanya kegiatan basis ekonomi dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan akan barang dan jasa, serta menimbulkan kenaikan kegiatan ekonomi lainnya dalam suatu daerah dalam perekonomian regional (Hasbullah, 1994:369).

Sektor basis akan menjadi sektor prioritas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi. Kenaikan dari pendapatan daerah tersebut tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap hasil sektor basis melainkan juga akan menaikkan permintaan terhadap hasil perekonomian non basis yang juga akan meningkatkan investasi disektor tersebut, dengan kata lain penanaman modal disektor basis atau sektor prioritas akan mempengaruhi peningkatan investasi (*induce investment*) sektor non basis sebagai akibat dari kenaikan investasi pada sektor basis atau prioritas. Teori ini dikembangkan atas dasar teori perdagangan (*comparative advantage*) yang diperkenalkan oleh Ricardo dan Mill, dan dikembangkan oleh Ohlin, Losh dan Isard. Teori ini digunakan untuk menganalisis perdagangan antar daerah didalam suatu negara dan hanya dikenal adanya dua jenis daerah yaitu: daerah basis dan daerah non basis (Kadariah, 1982:67).

Salah satu tujuan dari kebijakan pembangunan adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan dan kemakmuran antara daerah satu dengan daerah yang lain. Antara tujuan ini dan peningkatan pendapatan nasional terdapat pertentangan, jika tekanan diberikan pada cepatnya kenaikan pendapatan maka terlalu banyak investasi akan diadakan didaerah yang sudah maju yang memiliki sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial. Akibatnya daerah yang relatif maju akan semakin maju dan daerah terbelakang akan semakin sulit untuk berkembang. Hal ini akan dirasakan kurang adil, dan juga dapat mengganggu kestabilan politik maupun sosial. Karena hampir semua negara yang sedang mengadakan usaha pembangunan terdiri dari daerah-daerah yang relatif sudah maju dan daerah-daerah yang relatif terbelakang, baik secara absolut dan relatif maka tujuan mengurangi perbedaan dalam tingkat kemajuan ini perlu mendapat prioritas. Usaha ini dapat mengurangi kecepatan kenaikan pendapatan nasional,

yang berdampak pada pendapatan daerah perkapita dalam jangka pendek (Kadariah, 1982:69).

Permasalahan pembangunan pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa perkembangan daerah tidak terjadi secara bersama-sama dengan investasi yang berbeda. Kondisi daerah daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Suatu faktor dasar dalam perbedaan ini adalah struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk menciptakan struktur perekonomian yang berimbang dan melalui pembangunan daerah agar pembangunan berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Ada beberapa teknik analisis yang dapat membantu menemukan sektor prioritas pembangunan yang bertitik tolak potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satunya adalah teknik analisis *location quotient* (LQ), dalam hubungan kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam 2 golongan yaitu 1) kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar diluar daerah itu, 2) kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri. Kegiatan ekonomi yang termasuk golongan pertama disebut kegiatan ekonomi basis (*base activity*) sedangkan yang kedua disebut kegiatan ekonomi non basis (*non base activity*) atau lokal (Richardson, 1991:98).

2.2.2 Teori Industrialisasi Model Neo Klasik dan Model Strukturalis

Perkembangan tidak timbul di semua tempat pada waktu bersamaan. Timbulnya ada di beberapa tempat atau beberapa *growth poles* dengan intensitas yang berlainan dan menyebar melalui berbagai macam saluran dengan efek yang berlainan pula. Sebagaimana yang diungkapkan Peroux (Glasson, 1977:49) bahwa "pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah ubah; pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian.

Menurut Peroux daerah-daerah yang terletak dalam suatu wilayah yang luas tidaklah berkembang dalam intensitas dan kecepatan yang sama, dalam arti terdapat daerah yang mampu berkembang lebih cepat dari pada yang lainnya dan yang lainnya tertinggal. Daerah yang memiliki faktor penentu dan faktor pendorong yang lebih banyak akan mampu berkembang lebih cepat dari pada daerah yang lain, dan sebaliknya daerah yang kurang memiliki faktor penentu dan pendorong akan relatif tertinggal dari daerah yang lain (Glasson, 1977:50). Faktor-faktor penentu pengembangan daerah adalah faktor-faktor yang ada dibalik penawaran dan permintaan seperti tersedianya tenaga kerja yang banyak dengan tingkat produktivitas yang relatif tinggi dan tingkat upah yang relatif lebih murah, pendapatan perkapita penduduk yang lebih tinggi dan lokasi daerah relatif menguntungkan, motivasi atau dorongan untuk maju yang kuat dari masyarakatnya dan sebagainya. Daerah yang mampu berkembang cepat akan menjadi daerah pusat pertumbuhan dan kurang mampu berkembang menjadi daerah hinterland. Daerah pusat pertumbuhan secara sosial menjadi suatu kota besar dalam suatu wilayah yang luas dan merupakan pusat pelayanan jasa-jasa terutama jasa pemerintahan (*government service*), secara ekonomi menjadi pusat kegiatan ekonomi atau aglomerasi dan pusat konsentrasi penduduk yang mempunyai potensi pasar yang kuat bagi hasil-hasil produksi terutama bahan mentah dari sektor pertanian dan *raw material* produk lainnya.

Secara teoritis, di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan atau daerah yang maju akan membangun fungsi-fungsi produksi yang menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang proses pengerjaannya lebih padat kapital seperti barang-barang manufaktur dan hasil produksi industri lainnya dan daerah yang kurang maju yang menjadi hinterlandnya akan cenderung menghasilkan barang-barang yang dihasilkan dengan cara-cara produksi yang lebih padat tenaga kerja seperti hasil-hasil sektor pertanian.

Lebih spesifik Boudefille_x (dalam Glasson, 1977:68) mendefinisikan *growth poles* sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruhan daerah pengaruhnya.

Pusat pertumbuhan (*growth poles*) dapat diartikan dengan dua cara, (Kadariah, 1982:61) :

- a. arti fungsional dari *growth poles* menggambarkan *growth poles* sebagai kelompok perusahaan, cabang industri atau unsur-unsur dinamis yang menstimulir kehidupan ekonomi. Substansinya adalah adanya permulaan dan serangkaian perkembangan dengan efek multipliernya;
- b. arti geografis dari *growth poles* adalah yakni adanya usaha yang menyebabkan berbagai, macam usaha tertarik untuk berkumpul disuatu tempat, tanpa adanya interaksi antara usaha-usaha tersebut.

Dalam teori kutub pertumbuhan, konsep ekonomi yang harus dipenuhi adalah :

1. konsep *leading industries* ;

menyatakan bahwa pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan *propulsive* yang besar, yang termasuk dalam " *leading industries*" yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Ada kemungkinan bahwa suatu kompleks industri hanya terdiri dari satu atau segelintir perusahaan *propulsive* yang dominan.

2. konsep polarisasi ;

menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya kedalam kutub pertumbuhan. Implisit dalam proses polarisasi ini adalah berbagai macam keuntungan aglomerasi (keuntungan intern dan ekstern dari skala).

3. konsep *spread effect* ;

menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas *propulsive dynamic* dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang disekitarnya. Pada hakekatnya perekonomian merupakan gabungan dari sistim yang secara relatif aktif keadaannya dan industri yang sifatnya relatif lebih pasif. Kumpulan industri yang pertama akan mempengaruhi pembangunan kumpulan industri yang kedua.

2.2.3 Teori Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang (*Balanced and unbalanced Growth*)

Dengan pertumbuhan seimbang ini diartikan bahwa perkembangan perekonomian tidak akan berhasil bila investasi hanya terbatas pada titik pertumbuhan (*growing point*) tertentu atau sektor-sektor yang berkembang saja, sebab sektor-sektor lain berhubungan erat. Investasi harus disebarakan pada semua sektor, sehingga memperluas pasar antara satu sektor dengan sektor lainnya. Makin erat ketergantungan antara barang konsumsi dan barang produksi, antara sektor pertanian dan sektor industri maka pasar makin kuat. Kebaikan dari sistim pembangunan seimbang ialah satu sama lain saling membantu. Lagi pula pembangunan seimbang diantara sektor-sektor ini akan mengurangi kesulitan-kesulitan penawaran yang kadang menghambat perkembangan. Keburukan dari pembangunan seimbang, oleh Hirschman dikatakan bahwa masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya sukar sekali atau tidak dapat merubah sistim perekonomian tradisional menjadi sistim yang modern (Irawan dan Suparmoko, 1987 :114).

Menurut Hirschman pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang cocok untuk mempercepat proses pembangunan negara sedang berkembang. Pola pembangunan tidak seimbang ini berdasarkan pertimbangan bahwa: (1) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang; (2) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia; (3) pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*bottlenecks*) atau gangguan dalam proses pembangunan yang akan mendorong bagi pembangunan selanjutnya. Keadaan tersebut akan merangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak dimasa yang akan datang (Arsyad, 1997:92).

Pembangunan tidak seimbang ini juga lebih sesuai untuk dilaksanakan di negara yang sedang berkembang, karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumber daya. Melaksanakan program pembangunan tidak seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh

(*induced investment*) di berbagai sektor pada waktu berikutnya. Oleh karena itu sumber daya yang sangat langka itu dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang (Soekirno, 1978:323).



III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analisis yaitu, penelitian yang bermaksud membuat diskripsi situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat yang terjadi di daerah tertentu.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah berbagai sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Jombang. Unit analisis merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan sebagai basis analisis dan penarikan kesimpulan.

3.1.3 Populasi

Populasi penelitian ini adalah aktifitas sektor ekonomi di Kabupaten Jombang secara teoritis adalah aktivitas sektor ekonomi sejak Kabupaten Jombang berdiri. Dalam hal ini yang menjadi kajian adalah tahun 1999-2003 dikarenakan perekonomian Indonesia pada tahun tersebut sudah relatif stabil.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara mencatat kembali data yang telah didokumentasikan oleh instansi pemerintah yaitu kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang, BPS Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Kabupaten Jombang dengan menggunakan data *Time Series* mulai tahun 1999-2003, di samping juga melakukan studi pustaka.



3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui sektor prioritas pembangunan berdasarkan kaidah manfaat yang optimal, digunakan rumus *location quotient* (LQ) sebagai berikut (Yuwono, 1999:47):

$$LQ = \frac{X_{in} / Y_n}{X_i / Y}$$

Dimana :

LQ = perbandingan antara pangsa sektor i daerah n dengan daerah pangsa sektor i daerah himpunan

X_{in} = nilai tambah sektor i di daerah n

X_i = nilai tambah sektor i di daerah himpunan

Y_n = Produk Domestik Regional Bruto daerah n

Y = Produk Domestik Regional Bruto daerah himpunan

Kriteria LQ :

$LQ=1$, pangsa sektor i di daerah n sama dengan pangsa sektor i di daerah himpunan.

$LQ>1$, pangsa sektor i merupakan sektor prioritas bagi daerah n dan mampu bersaing dengan daerah lain dalam daerah himpunan.

$LQ<1$, pangsa sektor i bukan merupakan sektor prioritas bagi daerah n .

Asumsi yang digunakan :

1. teknik produksi yang digunakan sama;
2. dasar tukar produk antar daerah satu dengan yang lain adalah sama;
3. ongkos transportasi adalah sama (tidak memberatkan);
4. struktur pasar persaingan sempurna;
5. tidak ada perubahan dalam *oppurtunity cost*;
6. berlakunya sistim pembagian kerja.

3.3.2 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Untuk mengetahui sektor prioritas pembangunan yang potensial pada masa yang akan datang digunakan analisis *dynamic location quotient* (DLQ).

Dalam analisis DLQ, untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun 0 dan tahun t. Rumus DLQ sebagai berikut (Yuwono, 1999:49):

$$DLQ = \left[\frac{(1 + gin)/(1 + gn)}{(1 + Gi)/(1 + G)} \right]^t$$

Dimana :

- gin = rata-rata laju pertumbuhan sektor I di daerah n
- Gi = rata-rata laju pertumbuhan sektor I di daerah himpunan
- gn = rata-rata laju pertumbuhan daerah n
- G = rata-rata laju pertumbuhan daerah himpunan

Kriteria LQ :

$DLQ=1$, proporsi laju pertumbuhan sektor I terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB didaerah himpunan

$DLQ>1$, proporsi laju pertumbuhan sektor I terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih cepat dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB didaerah himpunan

$DLQ<1$, proporsi laju pertumbuhan sektor I terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih rendah dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB didaerah himpunan

3.3.3 Analisis Coefisient Resufle (CR)

Untuk mengetahui adanya sektor yang menguat dan sektor yang melemah atau kedudukan relatifnya digunakan koefisien pergeseran *Coefisient Resufle (CR)* dari perbandingan LQ pertama (Warpani, 1984:85). Hasil dari analisis CR nantinya dipergunakan untuk menentukan sektor atau subsektor yang mempunyai potensi untuk menjadi sektor atau subsektor unggulan di masa yang akan datang.

yaitu sektor atau subsektor yang mempunyai nilai CR lebih dari 0. Rumus analisis CR adalah sebagai berikut :

$$CR = \frac{(VR_i/VR_{2003} - VR_i/VR_{1999}) - (V_i/V_{2003} - V_i/V_{1999})}{100}$$

Keterangan :

CR : indeks LQ dari sektor atau subsektor i pada daerah j

VR_i : nilai tambah sektor atau subsektor i pada daerah j

VR : jumlah semua nilai tambah sektor atau subsektor i pada daerah j pada tahun t

V_i : nilai tambah sektor atau subsektor i pada daerah himpunan

V : jumlah semua nilai tambah sektor atau subsektor i pada daerah himpunan pada tahun t

Dengan kriteria :

$CR < 0$: Sektor i lemah

$CR = 0$: Sektor i tidak bergeser

$CR > 0$: Sektor i menguat

$CR = 1$: Sektor i bergeser mutlak

Dengan asumsi sebagai berikut :

1. teknik produksi yang digunakan sama;
2. dasar tukar produk antar daerah satu dengan yang lain adalah sama;
3. ongkos transportasi adalah sama (tidak memberatkan).

3.3.4 Analisis Skalogram (Skalling)

Analisis ini digunakan untuk menentukan rangking suatu data yang di analisa, cukup representatif dipakai untuk standarisasi data. Hasil skalling ini merupakan angka relatif antara 0-100 dapat dinyatakan rumus sebagai berikut (Budiharsono, 1991:337) :

$$Skalling = \frac{N - N_{min}}{N_{max} - N_{min}} \times 100$$

Dimana :

N : nilai variabel analisis

N_{max} : nilai maximum antara variabel analisis

N_{min} : nilai minimum antara variabel analisis

3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Untuk lebih memperjelas pengertian masalah yang dibahas digunakan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh sembilan sektor atau lapangan usaha, yang melakukan usahanya di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas dasar faktor produksi, dalam jangka waktu satu tahun.
2. nilai tambah dari setiap sektor di hitung dari nilai tambah PDRB per sektor per tahunnya atas dasar harga konstan tahun 1993.
3. laju pertumbuhan diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke n terhadap nilai pada tahun ke $n-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun $n-1$ kemudian dikalikan 100% .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang

4.1.1 Keadaan Geografi

Kabupaten Jombang terletak pada 05' 20' 01" sampai dengan 05' 30' 01" bujur timur dan 07' 20' 01" sampai dengan 07' 45' 01" lintang selatan. Kabupaten Jombang berbatasan dengan lima Kabupaten yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.

Kondisi lahan di Kabupaten Jombang relatif subur. Kondisi curah hujan di Kabupaten Jombang pada tahun 2003 rata-rata berkisar antara 43,9 sampai 325,8mm² dan besarnya curah hujan antara 0-2500 / tahun. Hal ini sangat menguntungkan sektor pertanian karena mata pencaharian masyarakat Kabupaten Jombang umumnya adalah bertani. Mengingat pertanian yang mendominasi dan juga yang paling besar memberikan kontribusinya pada pembangunan daerah Kabupaten Jombang maka keberadaan sungai sangatlah penting bagi perekonomian agraris, yaitu Sungai Brantas, Sungai Gunting, Sungai Jarak serta masih banyak lagi puluhan anak sungai yang melintasi Kabupaten Jombang yang mempunyai arti penting bagi sektor pertanian di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang rata-rata tidak memiliki kemiringan lahan hanya di Kecamatan Wonosalam yang mempunyai tingkat kemiringan antara 2-15⁰ m di atas permukaan laut. Dengan kondisi lahan yang cukup landai maka Kabupaten Jombang di samping sektor pertanian juga cocok sebagai kawasan industri itu dikarenakan letak Kabupaten Jombang yang cukup strategis dan juga akses komunikasi dan transportasi yang memadai.



4.1.2 Keadaan Demografi

Penduduk dan kepadatannya merupakan faktor yang penting dalam pengembangan sektor ekonomi. Apabila penduduk dimobilisir dengan benar maka akan menjadi sumber daya manusia yang mampu menunjang keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data regridasi tahun 2003 jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jombang sebesar 1.555.449 jiwa dengan kepadatan penduduk 997 jiwa / km². Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 1999-2003 digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rata-rata pertumbuhan (persen)
1999	1.121.721	-
2000	1.129.027	1,02
2001	1.138.473	1,16
2002	1.148.336	1,23
2003	1.555.449	3,34
Rata-rata / tahun		1,35

Sumber data: BPS Surabaya (Susenas beberapa edisi Propinsi Jawa Timur)

Berdasarkan tabel 1 jumlah penduduk Kabupaten Jombang dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan dari tahun ketahun, dari kurun waktu tersebut penduduk Kabupaten Jombang tertinggi pada tahun 2003 yaitu sebesar 1.555.449 jiwa dan rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun mengalami kenaikan sebesar 1,35%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang sangat pesat. Dengan sumber daya manusia yang melimpah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memajukan sektor-sektor yang ada di Kabupaten Jombang.

4.1.3 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Jombang

Struktur perekonomian Kabupaten Jombang pada kurun waktu 1999 sampai dengan tahun 2003, tidak mengalami pergeseran sektoral yaitu masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan sektor-sektor lainnya belum menunjukkan pergeseran yang menonjol. Komposisi peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya pada PDRB Kabupaten Jombang terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi 9 Sektor Utama dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Jombang Tahun 1993 (dalam persen)

Sektor atau Sub Sektor	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
Pertanian	42,30	42,05	40,72	39,76	38,16	40,59
Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,84	0,78	0,69	0,60	0,75
Industri Pengolahan	10,46	10,52	10,71	11,03	11,45	10,83
Listrik dan Air Bersih	2,93	2,89	2,91	2,93	2,99	2,93
Bangunan	3,60	3,49	3,20	2,96	2,80	3,21
Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,82	13,87	14,19	14,70	15,60	14,43
Pengangkutan dan Komunikasi	8,35	8,62	9,27	9,90	10,41	9,31
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,34	5,25	5,24	5,29	5,42	5,30
Jasa-jasa	12,35	12,48	12,98	12,72	12,58	12,62

Sumber: PDRB Kabupaten Jombang Tahun 1999-2000

Rata-rata kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Jombang atas harga konstan tahun 1993, pada tahun 1999 sampai dengan 2003 berasal dari sektor pertanian sebesar 40,59% kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,43% kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 12,62%.

Perkembangan PDRB Kabupaten Jombang atas dasar harga konstan tahun 1993, tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,67% per tahun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan

tahun 2003 rata-rata kenaikan per tahunnya hanya 1,35%. Secara terperinci laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2000-2003
(dalam persen)

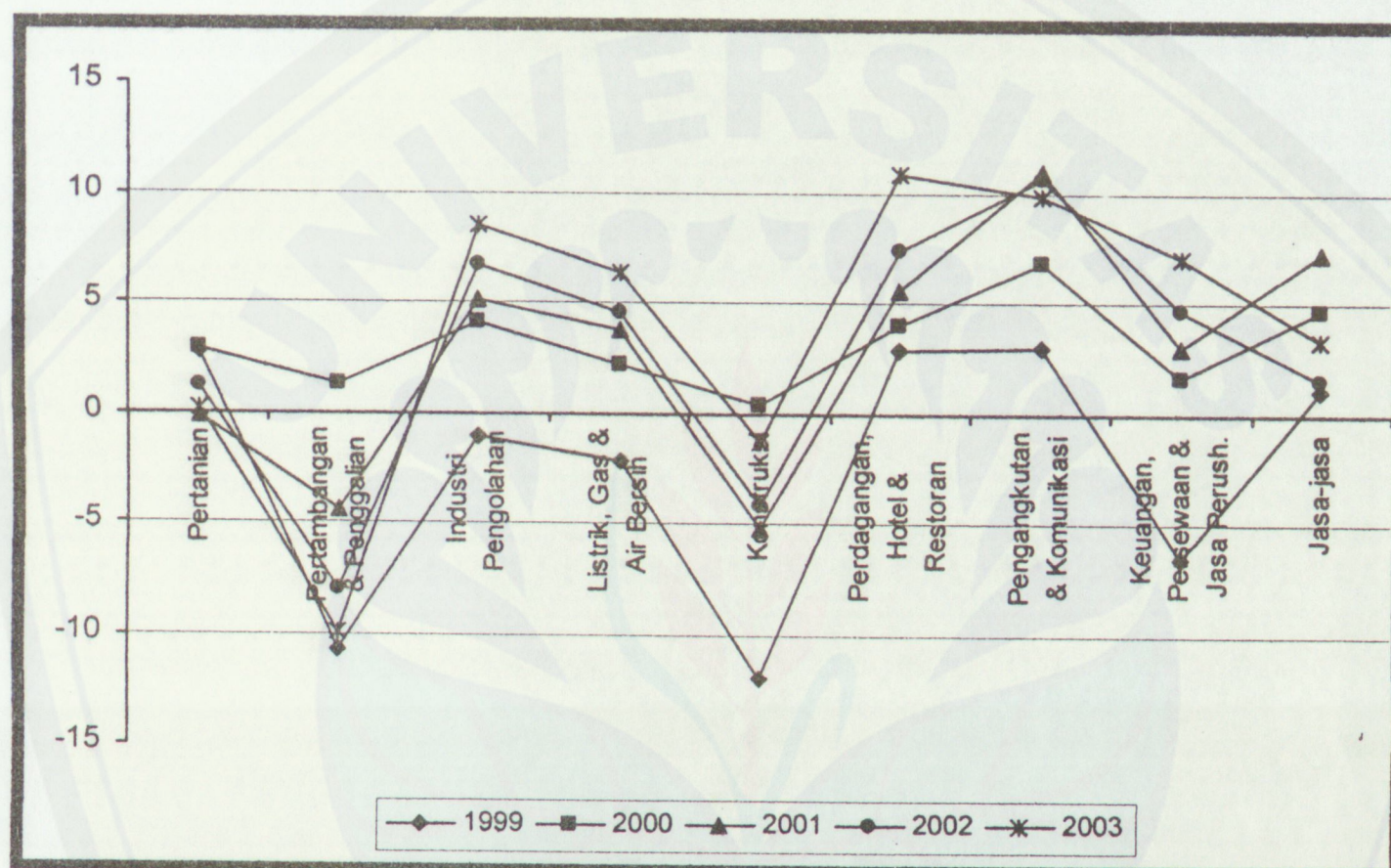
Sektor atau Sub Sektor	2000	2001	2002	2003	Rata-rata
Pertanian	2,91	-0,12	1,15	0,21	1,03
Pertambangan dan Penggalian	1,23	-4,46	-8,06	-9,96	-5,31
Industri Pengolahan	4,14	5,06	6,66	8,43	6,07
Listrik dan Air Bersih	2,15	3,78	4,55	6,32	4,2
Bangunan	0,36	-5,24	-4,23	-1,31	-2,69
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,93	5,54	7,31	10,79	6,89
Pengangkutan dan Komunikasi	6,83	10,93	10,63	9,82	9,55
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,68	2,97	4,64	7	4,07
Jasa-jasa	4,61	7,28	1,56	3,26	3,36
Rata-rata / tahun	3,53	3,15	3,59	4,44	3,67

Sumber data : lampiran 3

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Ini terlihat pada mulai tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang hanya 3,15 % pada tahun berikutnya naik menjadi sebesar 3,59% dan pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi sebesar 4,44% pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2003 masih diatas rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir yaitu sebesar 3,67%.

Dari tabel 3 juga dijelaskan rata-rata pertumbuhan per sektor di Kabupaten Jombang. Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Jombang terbesar berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai rasio rata-rata pertumbuhannya sebesar 9,55% per tahun lalu diikuti oleh sektor perdagangan,

hotel dan restoran dengan nilai rasio rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,89% per tahun dan sektor industri pengolahan dengan nilai rasio rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,07% per tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Jombang dengan cakupan selama lima tahun mulai awal tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Sektor-sektor di Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

Sumber data: PDRB Kabupaten Jombang 2003

Tabel 4. *Location Quotient* Sektor Perekonomian di Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

No	Sektor atau Sub Sektor	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata	Ranking
1	Pertanian	2,3161	2,3611	2,3346	2,2329	2,2661	2,3022	1
2	Pertambangan dan Penggalian	0,5759	0,4192	0,4019	0,3446	0,3132	0,4110	9
3	Industri Pengolahan	0,3813	0,3894	0,4035	0,4226	0,4594	0,4113	8
4	Listrik dan Air Bersih	1,2097	1,1074	1,0712	1,0076	1,0135	1,0819	4
5	Bangunan	0,7528	0,7598	0,7148	0,6543	0,6534	0,7070	6
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,6670	0,6622	0,6478	0,6257	0,6628	0,6531	7
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,0357	1,0329	1,1391	1,0921	1,1907	1,0981	3
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,9523	0,9338	0,9106	0,8823	0,9372	0,9232	5
9	Jasa-jasa	1,0979	1,1267	1,1726	1,1387	1,1387	1,1349	2

Sumber Data: lampiran 4

Tabel 4 menjelaskan bahwa LQ tertinggi pada tahun 1999 yaitu sektor pertanian sebesar (2,3161) lalu diikuti oleh sektor Listrik dan Air Bersih sebesar (1,2097) dan sektor Jasa-jasa sebesar (1,0979). Lalu pada tahun 2000 yaitu sektor pertanian sebesar (2,3611) lalu diikuti oleh sektor Jasa-jasa sebesar (1,1267) dan sektor Listrik dan Air Bersih sebesar (1,1074). Pada tahun 2001 urutan pertama ditempati oleh sektor pertanian sebesar (2,3346) lalu diikuti oleh sektor Jasa-jasa sebesar (1,1726) dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar (1,1391). Lalu pada tahun 2002 yaitu sektor pertanian sebesar (2,2329) menempati urutan pertama lalu diikuti oleh sektor Jasa-jasa sebesar (1,1387) dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar (1,0921). Pada tahun 2003 sektor pertanian masih tetap menempati urutan pertama dengan nilai sebesar (2,2661) lalu diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar (1,1907) dan sektor Jasa-jasa sebesar (1,1387).

Dengan demikian yang menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 adalah sektor pertanian lalu diikuti oleh sektor Jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan Komunikasi dan hal ini dikarenakan nilai rata-rata $LQ > 1$

4.2.2 *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Analisa DLQ sama dengan analisa LQ, hanya untuk mengintroduksi laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tertentu. Analisa DLQ juga bermanfaat untuk dapat meramalkan sektor apa yang akan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan yang tetap (Yuwono, 1999:49). Hasil dari analisa DLQ Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. *Dynamic Location Quotient* Sektor Perekonomian di Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

No	Sektor atau Subsektor	DLQ 1999-2003	Rank
1	Sektor Pertanian	0,63524	6
2	Sektor Pertambangan dan Galian	-0,42329	8
3	Sektor Industri Pengolahan	4,88701	1
4	Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	0,42629	7
5	Sektor Bangunan	-2,09925	9
6	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,88900	4
7	Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	1,48924	2
8	Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,10899	3
9	Sektor Jasa-jasa	0,86206	5

Sumber data: lampiran 5

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa dari hasil analisis *Dynamic Location Quotient* Sektor Industri Pengolahan menempati urutan pertama dengan nilai rasio sebesar (4,88701) lalu diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan nilai rasio sebesar (1,48924) dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan nilai rasio sebesar (1,10899).

Hal ini berarti sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dapat menjadi sektor unggulan dimasa yang akan datang dengan asumsi keadaan yang tetap.

4.2.3 *Coefisient Resufle* (CR)

Untuk mengetahui adanya sektor yang menguat dan sektor yang melemah atau kedudukan relatifnya dalam kurun waktu tertentu, maka digunakan koefisien pergeseran *coefisient resufle* (CR). Sektor yang memiliki nilai CR lebih dari nol maka sektor ini memberikan nilai yang lebih besar pada kegiatan ekonomi suatu daerah dan mengalami kecenderungan pergeseran yang lebih kuat dibandingkan sektor yang lain. Sektor yang memiliki nilai CR kurang dari nol maka sektor ini

kurang memberikan nilai pada kegiatan ekonomi suatu daerah dan mengalami kecenderungan pergeseran yang semakin melemah dibandingkan dengan sektor lainnya (Warpani, 1984:45).

Hasil dari analisis CR nantinya dipergunakan untuk menentukan sektor atau subsektor apakah yang mempunyai potensi untuk menjadi sektor atau subsektor unggulan dimasa yang akan datang, yaitu sektor atau subsektor yang mempunyai nilai CR lebih dari nol mengalami pergeseran yang cukup kuat sehingga memungkinkan pada suatu saat nanti sektor atau sub sektor tersebut akan menjadi sektor unggulan. Demikian juga sebaliknya sektor atau sub sektor yang mempunyai nilai CR kurang dari nol. Sektor atau sub sektor ini mengalami pergeseran yang cenderung melemah hal ini memungkinkan terjadinya pergeseran dari sektor atau sub sektor yang semula menjadi sektor prioritas akan bergeser menjadi sektor atau sub sektor yang bukan prioritas. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Coefisient Resufle Sektor Perekonomian di Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

No	Sektor atau Subsektor	CR 1999-2003	Rank
1	Sektor Pertanian	-0,041623	9
2	Sektor Pertambangan dan Galian	-0,002586	7
3	Sektor Industri Pengolahan	0,009717	3
4	Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	0,000643	6
5	Sektor Bangunan	-0,008033	8
6	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,018101	2
7	Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	0,020643	1
8	Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,000812	5
9	Sektor Jasa-jasa	0,002310	4

Sumber data: lampiran 6

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa dari hasil analisis *Coefisient Resufle* Sektor Pengangkutan dan Komunikasi menempati urutan pertama dengan nilai rasio sebesar (0,020643) lalu diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai rasio sebesar (0,018101) dan Sektor Industri Pengolahan dengan nilai rasio sebesar (0,009717)

Hal ini berarti Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Industri Pengolahan menguat dari tahun ketahun ini terlihat dari nilai rasionya CR lebih besar dari nol.

4.2.4 Skalling

Berdasarkan analisis sebelumnya yaitu analisis LQ, DLQ dan CR diperoleh hasil yang berbeda beda. Untuk menentukan sektor apa yang menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang antara tahun 1999-2003 maka digunakan analisis skalling, yaitu suatu analisis untuk menentukan rangking suatu data yang dianalisa, cukup repressentatif dipakai untuk standarisasi data. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Skalling Sektor Perekonomian di Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

Sektor atau Sub sektor	DLQ		LQ 1999		LQ 2000		LQ 2001		LQ 2002		LQ 2003		CR		Total Skalling
	DLQ	Skalling	LQ 1999	Skalling	LQ 2000	Skalling	LQ 2001	Skalling	LQ 2002	Skalling	LQ 2003	Skalling	CR	Skalling	
Sektor Pertanian	0,6352	0,1992	2,316145	1	2,361164	1	2,334640	1	2,232961	1	2,266158	1	-0,04162	0	5,1992
Sektor Pertambangan dan Galian	-0,4232	-5,6347	0,575995	0,10058	0,419290	0,01513	0,401934	0	0,344607	0	0,313217	0	-0,2586	0,62693	0,7426
Sektor Industri Pengolahan	4,8870	1	0,381395	0	0,389439	0	0,403583	0,00085	0,422631	0,04131	0,459471	0,07488	0,00971	0,82452	1,9415
Sektor Listrik, Gas dan Air Panas	0,4262	0,1599	1,209781	0,42816	1,107498	0,36417	1,071253	0,34631	1,007633	0,35113	1,013534	0,35859	0,00064	0,67879	2,6871
Sektor Bangunan	-2,0992	-0,3156	0,752858	0,19199	0,759802	0,18783	0,714853	0,1619	0,654371	0,16403	0,633452	0,17421	-0,0080	0,53945	1,1037
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,8890	0,2470	0,667074	0,14765	0,662256	0,13836	0,647827	0,12722	0,623752	0,14888	0,662869	0,17903	0,0181	0,95917	1,9474
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	1,4892	0,3601	1,035797	0,33823	1,032983	0,32638	1,139141	0,38143	1,092160	0,39587	1,190758	0,44934	0,02064	1	3,2513
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,1089	0,2885	0,952307	0,29508	0,933882	0,27612	0,910651	0,26321	0,882382	0,28478	0,937273	0,31954	0,00081	0,68151	2,4087
Sektor Jasa-jasa	0,8620	0,2420	1,097989	0,37038	1,126708	0,37392	1,172655	0,39877	1,138758	0,42055	1,138758	0,42271	0,00231	0,03709	2,2654

Tabel 7 menjelaskan bahwa nilai skalling tertinggi pada yaitu sektor pertanian sebesar (5,1992) diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar (3,2513) dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar (2,6871). Jadi berdasarkan analisis skalling sektor pertanian menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang, lalu diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor listrik, gas dan air bersih.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Sektor Prioritas di Kabupaten Jombang

Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah menyusun strategi pembangunan ekonomi diantaranya kegiatan ekonomi basis yaitu membagi sektor ekonomi menurut lokasi penjualan atau pemasaran. Sektor basis ekonomi didefinisikan sebagai sektor yang mampu memenuhi kebutuhan wilayah tersebut juga mengeksport keluar wilayah (Hasbullah, 1994:367).

Permasalahan pembangunan pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa perkembangan daerah tidak terjadi secara bersama-sama dengan investasi yang berbeda. Kondisi daerah-daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Suatu faktor dasar dalam perbedaan ini adalah struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk menciptakan struktur perekonomian yang berimbang dan melalui pembangunan daerah agar pembangunan berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Richardson, 1991:98).

Ada beberapa teknik analisis yang dapat membantu menemukan sektor prioritas pembangunan yang bertitik tolak potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan teknik analisis *location quotient* (LQ), *dynamic location quotient* (DLQ), dan *coefisient resufle* (CR).

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Penentuan Sektor Basis Kabupaten Nganjuk Tahun 1996-2000 “ menjelaskan bahwa dengan analisis skalling *location quotient* (LQ), *dynamic location quotient* (DLQ), sektor prioritas di Kabupaten Nganjuk pada tahun 1996-2000 adalah sektor pertanian menempati urutan pertama,

dan selanjutnya pada urutan kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan yang menempati urutan ketiga adalah adalah sektor jasa-jasa.

Berdasarkan analisis *location quotient* (LQ) yang menjadi sektor prioritas atau sektor yang mempunyai daya saing dengan daerah lain dalam himpunan di Kabupaten Jombang tahun 1999 adalah sektor pertanian sebesar 2,3161 diikuti oleh sektor listrik dan air bersih sebesar 1,2097 dan sektor jasa-jasa sebesar 1,0979. Pada tahun 2000 yaitu sektor pertanian sebesar 2,3611 diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 1,1267 dan sektor listrik dan air bersih sebesar 1,1074. Pada tahun 2001 urutan pertama ditempati oleh sektor pertanian sebesar 2,3346 diikuti oleh sektor Jasa-jasa sebesar 1,1726 dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,1391. Pada tahun 2002 yaitu sektor pertanian sebesar 2,2329 menempati urutan pertama diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 1,1387 dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,0921. Pada tahun 2003 sektor pertanian masih tetap menempati urutan pertama dengan nilai sebesar 2,2661 diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,1907 dan sektor jasa-jasa sebesar 1,1387.

Dilanjutkan dengan analisis *dynamic location quotient* (DLQ) yaitu analisis yang digunakan untuk mencari sektor prioritas pembangunan yang potensial pada masa yang akan datang dengan cara mengintroduksi laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun 0 dan tahun t. Dari hasil analisis DLQ diketahui bahwa Sektor Industri Pengolahan menempati urutan pertama dengan nilai rasio sebesar 4,88701 diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan nilai rasio sebesar 1,48924 dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan nilai rasio sebesar 1,10899.

Diteruskan dengan analisis *coefisient resufle* (CR) yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya sektor yang menguat dan sektor yang melemah atau kedudukan relatifnya dalam kurun waktu tertentu. Dari hasil analisis CR diketahui bahwa sektor yang menguat dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2003 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi menempati urutan pertama

dengan nilai rasio sebesar 0,020643 lalu diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai rasio sebesar 0,018101 dan sektor industri pengolahan dengan nilai rasio sebesar 0,009717.

Berhubung dari analisis *location quotient* (LQ), *dynamic location quotient* (DLQ), dan *coefisient resufle* (CR) diperoleh hasil yang berbeda-beda maka untuk menentukan sektor mana yang menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 digunakan analisis Skalling, yaitu analisis untuk menentukan rangking suatu data yang dianalisa, cukup representatif dipakai untuk standarisasi data. Hasil dari analisis skalling adalah sektor pertanian menempati urutan pertama dengan nilai sebesar 5,1992 diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,2513 dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 2,6871. Jadi berdasarkan analisis skalling sektor pertanian menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang, lalu diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor listrik, gas dan air bersih.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, sektor yang menjadi sektor prioritas di Kabupaten Jombang antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 adalah sebagai berikut: 1) sektor pertanian dengan nilai sebesar 5,1992 ; 2) sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai sebesar 3,2513 ; 3) sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai sebesar 2,6871.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka ada beberapa saran untuk pembangunan wilayah Kabupaten Jombang antara lain :

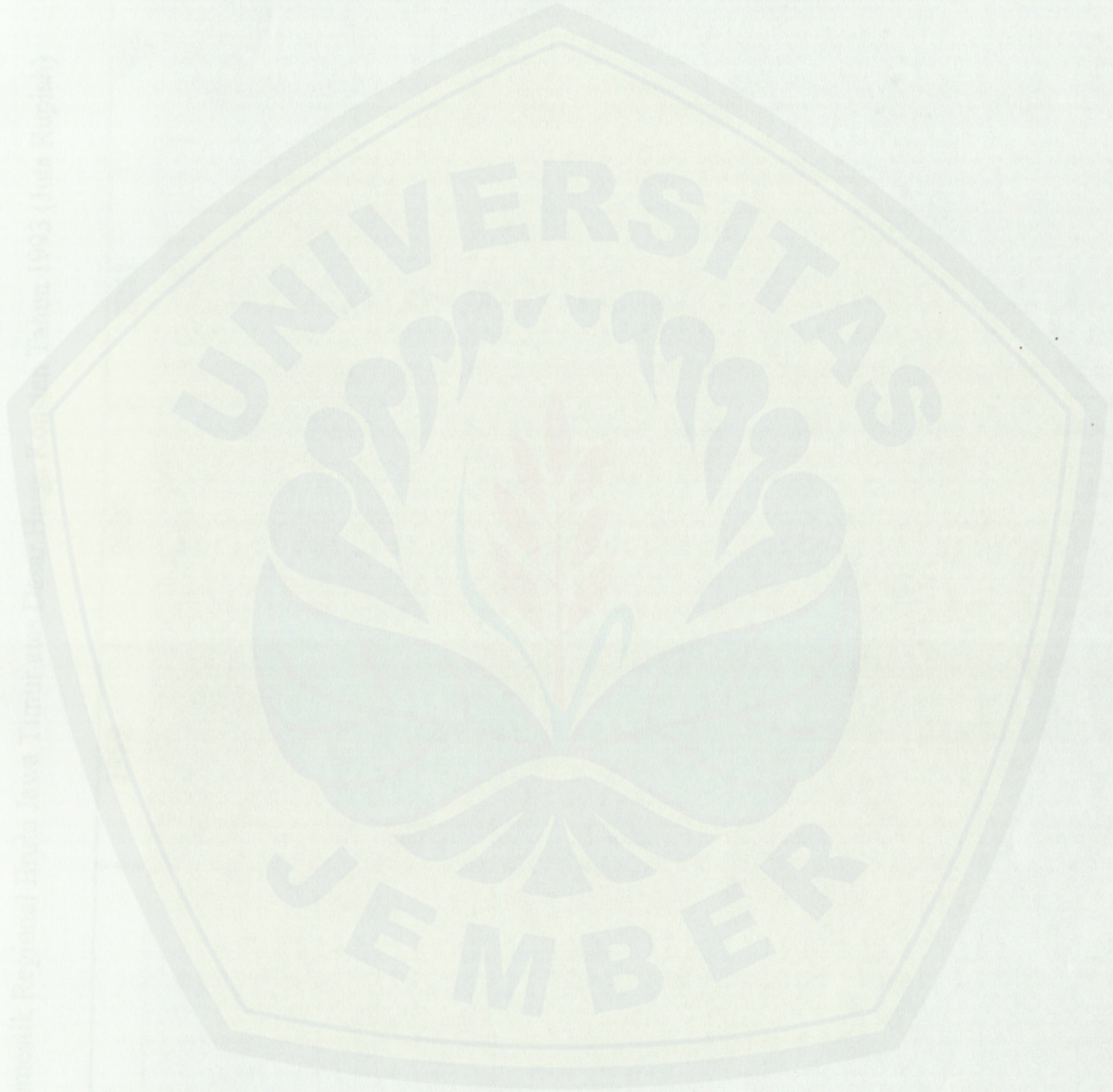
1. menetapkan sektor pertanian sebagai *leading sector* dalam pengembangan perekonomian wilayah yang mampu merangsang pertumbuhan sektor perekonomian lainnya;
2. untuk mempercepat pengembangan perekonomian daerah, maka perlu memperbesar penanaman investasi khususnya pada sektor pertanian karena memiliki keterkaitan yang besar terhadap perekonomian yang lainnya, dengan demikian akan dapat mendorong lapangan usaha lainnya yang mendukung lapangan usaha yang dijadikan *leading sector*, sehingga dapat meningkatkan produksi regional secara keseluruhan melalui dampak peng gandanya;
3. untuk memperlancar upaya pengembangan perekonomian wilayah diperlukan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodir segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sektor pertanian seperti kemudahan dalam perijinan atau kemudahan dalam hal birokrasi demi terciptanya iklim usaha yang kondusif, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L . 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE-YKPN.
- Penerbit Arkola. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*. Surabaya .
- Budiharsono.1991. *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Teori Model Perencanaan dan Penerapannya*. Jakarta : UI.
- ... 2003 a. *Kabupaten Jombang dalam Angka*. Kabupaten Jombang.
- ... 2003 b. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang 2003*. Kabupaten Jombang .
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta : LPFE-UI.
- Hasbullah. 1994. *Analisis Basis Ekonomi pada Industri Pengolahan di Nusa Tenggara Barat*, Seminar Hasil Penelitian Perguruan Tinggi, Sawangan. Bogor
- Irawan, dan M Suparmoko. 1987. *Ekonomi Pembangunan*.Yogyakarta : BPFE
- Kadariah. 1982. "*Ilmu Ekonomi Perencanaan*". Jakarta : LPFE-UI.
- Penerbit Forum Konstitusi. 2004. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta
- Prayitno, H. 1996. *Pola Pembangunan Jawa Timur selama PJPT II* . Jakarta : Ekonosia
- Richardson, H. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta : LPFE-UI
- Simanjuntak. 1996. *Ekonomi Regional*. Yogyakarta :BPFE
- Spillane, J dan Wan U, 1988. *Pengantar Ekonomi Regional*. Jakarta : Karunika UT
- Soebardi, dkk .1988. *Materi Pokok Ekonomi Perencanaan II*. Jakarta : Karunika UT
- Soekirno, S . 1978 .*Ekonomi pembangunan*. Petaling Jaya : Ghalia Malaysia
- Warpani, S . 1984. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Erlangga

Wibisono, H, A. 2002. *Analisis Penentuan Sektor Basis Kabupaten Nganjuk Tahun 1996-2000*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Yuwono, P. 1999. *Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU No.22/1999*, Yogya : Kritis Volume XII No.2.



Lampiran 1 : Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah)

Sektor atau Sub Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	10.056.430,48	10.126.247,34	10.246.976,92	10.461.874,85	10.649.954,58
Pertambangan dan Penggalian	820.481,97	1.138.197,73	1.136.381,98	1.176.352,64	1.202.792,84
Industri Pengolahan	15.096.119,16	15.357.553,01	15.597.265,77	15.335.942,61	15.767.591,92
Listrik dan Air Bersih	1.332.448,19	1.483.158,36	1.594.202,10	1.710.559,78	1.863.983,76
Bangunan	2.629.204,56	2.607.913,29	2.631.188,42	2.657.360,80	2.707.175,06
Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.403.499,39	11.908.392,17	12.871.766,90	13.805.154,89	14.883.857,75
Pengangkutan dan Komunikasi	4.441.895,08	4.745.526,75	4.792.517,95	5.327.307,91	5.531.794,96
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.087.742,86	3.193.520,82	3.378.586,36	3.522.598,67	3.657.757,65
Jasa-Jasa	6.191.148,76	6.296.011,25	6.501.293,81	6.756.904,05	6.987.257,93
PDRB Jawa Timur ADH Konstan	55.058.970,46	56.856.520,71	58.750.180,22	60.754.056,19	63.252.166,46

Sumber: BPS Beberapa edisi Jawa Timur Dalam Angka

Lampiran 2 : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah)

Sektor atau Sub Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	444.255,80	457.197,40	456.637,67	461.919,48	462.932,43
Pertambangan dan Penggalian	9.013,87	9.125,60	8.718,34	8.015,64	7.222,09
Industri Pengolahan	109.815,52	114.364,42	120.153,91	128.158,76	138.964,52
Listrik dan Air Bersih	30.745,43	31.409,40	32.598,05	34.081,31	36.237,68
Bangunan	37.753,84	37.889,84	35.902,51	34.383,52	33.931,56
Perdagangan, Hotel dan Restoran	145.089,36	150.802,83	159.167,12	170.812,50	189.244,39
Pengangkutan dan Komunikasi	87.753,94	93.736,09	103.985,31	115.045,52	126.348,33
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	56.084,32	57.028,38	58.727,71	61.456,79	65.759,80
Jasa-Jasa	129.656,07	135.645,78	145.521,09	147.801,51	152.622,28
PDRB Jawa Timur ADH Konstan	1.050.150,17	1.087.199,73	1.121.411,70	1.161.675,04	1.213.263,08

Sumber: BPS Beberapa Edisi Kabupaten Jombang Dalam Angka

Lampiran 3 : Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003 (dalam persen)

Sektor atau Sub Sektor	1999		2000		2001		2002		2003		Rata-rata / tahun	
	Jbg	Jatim	Jbg	Jatim	Jbg	Jatim	Jbg	Jatim	Jbg	Jatim	Jbg	Jatim
Pertanian	-	-	2,91	0,69	0,12	1,19	1,15	2,10	0,21	1,79	1,03	1,44
Pertambangan dan Penggalan	-	-	1,23	38,72	-4,46	0,16	-8,06	3,52	-9,96	2,24	-5,31	11,16
Industri Pengolahan	-	-	4,14	1,73	5,06	1,56	6,66	-1,68	8,43	2,81	6,07	1,1
Listrik dan Air Bersih	-	-	2,15	11,31	3,78	7,49	4,55	7,30	6,32	8,96	4,2	8,76
Bangunan	-	-	0,36	0,81	-5,24	0,89	-4,23	0,99	-1,31	1,87	-2,69	1,14
Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	-	3,93	4,43	5,54	8,09	7,31	7,25	10,79	7,81	6,89	6,89
Pengangkutan dan Komunikasi	-	-	6,83	6,84	10,93	0,99	10,63	11,16	9,82	3,83	9,55	5,7
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	1,68	3,43	2,97	5,80	4,64	1,86	7,00	3,83	4,07	3,26
Jasa-Jasa	-	-	4,61	1,69	7,28	3,26	1,56	5,52	3,26	3,40	3,36	3,46
PDRB Jawa Timur ADH Konstan	-	-	3,09	3	2,89	3	2,69	3	3,84	4,06	3,67	3,26

Sumber Data: data diolah dari lampiran 1 dan lampiran 2

Lampiran 4 : Perhitungan *Location Quotient* Kabupaten Jombang Tahun 1999

Sektor atau Sub Sektor	Xi 1999 Jombang	Xi 1999 Jawa Timur	B		A		A / B
			Xin / Yn	Xi / Y			
Pertanian	444.255,80	10.126.247,34	0,4230	0,1826	LQ	2,3161	
Pertambangan dan Penggalian	9.013,87	1.138.197,73	0,0085	0,0149		0,5759	
Industri Pengolahan	109.815,52	15.357.553,01	0,1045	0,2241		0,3813	
Listrik dan Air Bersih	30.745,43	1.483.158,36	0,0292	0,0242		1,2097	
Bangunan	37.753,84	2.607.913,29	0,0359	0,0477		0,7528	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	145.089,36	11.908.392,17	0,1381	0,2071		0,6670	
Pengangkutan dan Komunikasi	87.753,94	4.745.526,75	0,0835	0,0806		1,0357	
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	56.084,32	3.193.520,82	0,0534	0,0560		0,9523	
Jasa-Jasa	129.656,07	6.296.011,25	0,1234	0,1124		1,0979	
PDRB Jombang / JATIM ADH Konstan (1993)	1.050.150,17	56.856.520,71					

Lampiran 5 : Perhitungan *Dynamic Location Quotient* Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

Sektor atau Sub Sektor	Rata-rata Laju Pertumbuhan		Rata-rata Laju Pertumbuhan JATIM	B		A		A/B
	Jombang			Gin / gn	Gi/G	DLQ		
Pertanian	1,03		1,4425	0,2806	0,4418		0,6352	
Pertambangan dan Penggalian	-5,31		11,16	-1,4468	3,4180		-0,4232	
Industri Pengolahan	6,07		1,105	1,6539	0,3384		4,8870	
Listrik dan Air Bersih	4,2		8,765	1,1444	2,6845		0,4262	
Bangunan	-2,69		1,14	-0,7329	0,3491		-2,0992	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,89		6,895	1,8773	2,1117		0,8890	
Pengangkutan dan Komunikasi	9,55		5,705	2,6021	1,7473		1,4892	
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,07		3,265	1,1089	1		1,1089	
Jasa-Jasa	3,36		3,4675	0,9155	1,0620		0,8620	
Rata-rata Laju Pertumbuhan / Tahun	3,67		3,26					

Lampiran 6 : Perhitungan Coefisient Resufle Kabupaten Jombang Tahun 1999-2003

Sektor atau Sub Sektor	Jombang		JATIM		A	B	C	D	E	F	G
	1999	2003	1999	2003							
Pertanian	444.255,80	462.932,43	10.056.430,48	10.649.954,58	0,3815	0,1826	0,4230	0,1683	-0,0414	C-D	E-F/100
Pertambangan dan Penggalian	9.013,87	7.222,09	820.481,97	1.202.792,84	0,0059	0,0149	0,0085	0,0190	-0,0026	A-B	-0,2586
Industri Pengolahan	109.815,52	138.964,52	15.096.119,16	15.767.591,92	0,1145	0,2241	0,1045	0,2492	0,0099	0,0248	0,00971
Listrik dan Air Bersih	30.745,43	36.237,68	1.332.448,19	1.863.983,76	0,0298	0,0242	0,0292	0,0294	0,0005	-0,0052	0,00064
Bangunan	37.753,84	33.931,56	2.629.204,56	2.707.175,06	0,0279	0,0477	0,0359	0,0422	0,0079	0,0049	-0,0080
Perdagangan, Hotel dan Restoran	145.089,36	189.244,39	11.403.499,39	14.883.857,75	0,1559	0,2071	0,1381	0,2353	0,0178	-0,0281	0,0181
Pengangkutan dan Komunikasi	87.753,94	126.348,33	4.441.895,08	5.531.794,96	0,1041	0,0806	0,0835	0,0874	0,0205	-0,0067	0,02064
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	56.084,32	65.759,80	3.087.742,86	3.657.757,65	0,0542	0,0560	0,0534	0,0578	0,0007	-0,0017	0,00081
Jasa-Jasa	129.656,07	152.622,28	6.191.148,76	6.987.257,93	0,1257	0,1124	0,1234	0,1104	0,0023	0,0019	0,00231
PDRB Jombang / JATIM ADH Konstan (1993)	1.050.150,17	1.213.263,08	55.058.970,46	63.252.166,46							

